



UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

diberikan kepada

Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardana, M.A.

sebagai

Pemakalah Utama

Dalam SEMINAR NASIONAL SASTRA DAN BUDAYA III
yang diselenggarakan pada 28 - 29 Maret 2018
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

Dekan Fakultas Ilmu Budaya,

Prof. Dr. Ni Luh Sunjiati Beratha, M. A
NIP. 19590917 198403 2 002



Denpasar, 29 Maret 2018
Ketua Panitia,

Dr. Ni Made Suryati, M. Hum
NIP. 19601231 198403 2 002

PANITIA
SEMNAS SASTRA DAN BUDAYA III

ISBN 978-602-294-269-6



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SASTRA DAN BUDAYA III
MENGKAJI SASTRA DAN BUDAYA
MEMBANGUN DEMOKRASI YANG SEHAT**



DENPASAR, 28 - 29 MARET 2018

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
2018**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SASTRA DAN BUDAYA III**

**MENGAJI SASTRA DAN BUDAYA
MEMBANGUN DEMOKRASI YANG SEHAT**

Penyunting Ahli
Dr. I Ketut Sudewa, M.Hum

Penyunting Pelaksana
Drs. I Wayan Teguh, M.Hum

DENPASAR, 28 – 29 MARET 2018

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PEMAKALAH KUNCI	
MENGAJAI SASTRA DAN BUDAYA MEMBANGUN DEMOKRASI YANG SEHAT Suwardi Endraswara	1
PEMAKALAH UTAMA	
MEMAKNAI DEMOKRASI SPIRITUAL DALAM TAHUN POLITIK 2018.....	22
I Ketut Ardhana	
PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM SASTRA TUTUR BAGAWAN KAMANDAKA: ANALISIS PERCAKAPAN	37
I Nyoman Suarka	
PEMAKALAH PENDAMPING	
PRAKTEK SEJARAH LISAN SEBAGAI PENGALAMAN PRIBADI	47
Anak Agung Inten Asmariati	
PUBLIC STIGMA DAN SELF STIGMA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ..	53
Bambang Dharwiyanto Putro	
BUDAYA <i>DUAN LOLAT</i> DI TENGAH ARUS JAMAN IBU KOTA JAKARTA	63
Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo	
RENDAH HATI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL ORANG BALI MELALUI PUPUH	71
I Gede Budiasa	
KESEMESTAAN BAHASA: KAJIAN PSIKOLINGUISTIK	78
I Gusti Ngurah Ketut Putrayasa	
MULTIKULTURAL DALAM MEDIA KAMPANYE CAGUB BALI KAJIAN WACANA.....	84
I Gusti Ngurah Parthama, Ni Luh Kade Yuliani Giri	

MAKNA BAHASA FIGURATIF PADA LIRIK LAGU KISS FROM A ROSE OLEH SEAL.....	90
I Gusti Ayu Agung Nila Wijayanti	
BAHASA KIAS DAN PENGGUNAANNYA DALAM TUTURAN RESMI.....	95
I Ketut Darma Laksana	
RESI WISWAMITRA MENGUJI KEBIJAKAN SANG DASARARTHA SEBAGAI PEMIMPIN	103
I Ketut Jimaya	
KALIMAT DIREKTIF DALAM KARANGAN ILMIAH SISWA SMA SURYA WISATA KEDIRI, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN.....	111
I Ketut Nama	
IKONISITAS SEKSUAL DALAM KUMPULAN CERPEN CALONARANG KARYA MADE SUARSA	118
I Ketut Ngurah Sulibra, I Nyoman Duana Sutika, Luh Putu Puspawati	
BEBERAPA FENOMENA FONOLOGIS PADA TATARAN SINTAKSIS DI DALAM BAHASA BALI	128
I Made Madia	
“BERAGAM” DAN “SERAGAM” DALAM CERPEN <i>MEONG-MEONG</i> KARYA MADE SANGGRA	141
I Made Suarsa	
<i>KURSI PEMILU</i> : SASTRA DAN BUDAYA DEMOKRASI PRA REFORMASI.....	148
I Nyoman Suaka	
ESTETIKA SEBAGAI YOGA SANG KAWI DALAM KAKAWIN SUTASOMA..	157
I Nyoman Sukartha	
KEKOHESIFAN DALAM WACANA NARATIF BAHASA MELAYU BALI.....	164
I Nyoman Suparwa	
WACANA “KERAJAAN MAJAPAHIT BALI”: DINAMIKA PURI DALAM PUSARAN POLITIK IDENTITAS KONTEMPORER.....	172
I Putu Gede Suwatha	
MAKNA KOLOFON <i>GEGURITAN WIRA CARITA PUPUTAN MARGARANA</i>	180
I Wayan Cika	
GANESHA: DEWA BERKEPALA GAJAH, SEBUAH TARINGNYA PATAH.....	187
I Wayan Redig, Kadek Dedy Prawirajaya R	

EKSISTENSI UANG KEPENG DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT BALI.....	195
I Wayan Srijaya dan Kadek Dedy Prawirajaya R	
BUDAYA DEMOKRASI DALAM SENI <i>MAGEGITAN</i> INTERAKTIF DI RADIO DAN TV	204
I Wayan Suardiana	
WACANA <i>PULUNG (JABATAN)</i> DALAM KONTEKS PEMILIHAN PEMIMPIN BERKARISMA	211
I Wayan Suwena	
PENGUNAAN BAHASA DI RUANG PUBLIK: KAJIAN PEMAKAIAN BAHASA DI KAWASAN <i>HERITAGE</i> KOTA DENPASAR	217
I Wayan Teguh, I Wayan Simpen	
DINAMIKA PENGGUNAAN RAGAM BAHASA DIALEK JAWA BARAT: ANTARA POLITIK DAN DEMOKRASI	224
Juanda	
PENGARUH PILKADA SERENTAK DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA BERDEMOKRASI DI INDONESIA: REFLEKSI KASUS PILKADA DI BALI.....	229
Ketut Darmana	
NILAI DEMOKRASI DALAM CERPEN "SUKRENI DI LOVINA" KARYA I.B.W WIDIASA KENITEN	238
Ketut Yarsama	
KEINDAHAN YANG TERPANTUL DALAM <i>KIDUNG TANTRI RAGA WINASA</i> SEBUAH KAJIAN EKOSEMOTIK	250
Komang Paramartha, I Nyoman Sukartha	
GEGURITAN ARJUNA WIWAHA: ANALISIS STRUKTUR DAN KARAKTER TOKOHNYA	257
Luh Putu Puspawati, Made Suastika	
MEMORI BUDAYA DAN PENULISAN KARYA SASTRA DALAM PEMBERDAYAAN BAHASA IBU	264
Maria Matilidis Banda	
TUTURAN BERSIPUNG SUKU PASER PEMATANG KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI ASPEK PUISI LAMA DAN NILAI BUDAYA	271
Mursalim	

NILAI-NILAI KARAKTERISTIK DALAM TEKS SASTRA <i>THE HISTORY OF THE LIFE OF AJAMILA</i>	279
Ni Ketut Dewi Yulianti	
IMPLEMENTASI BAHASA JAWA KUNA PADA NAMA-NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA DENPASAR.....	287
Ni Ketut Ratna Erawati, I Made Wijaya, Komang Paramartha, I Ketut Nuarca	
ASPEK BUDAYA POPULER JEPANG DALAM NOVEL <i>TEENLIT</i> INDONESIA: KAJIAN TERHADAP NOVEL <i>WINTER IN TOKYO</i> KARYA ILANA TAN.....	297
Ni Luh Putu Ari Sulatri, Ni Made Andry Anita Dewi	
IDEOLOGI MULTIKULTURALISME SEBAGAI LANDASAN HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA ORANG BALI DAN CINA DI <i>DESA PAKRAMAN</i> DI BALI.....	303
Ni Luh Sutjiati Beratha	
STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA JEPANG DALAM MERESPON PUJIAN.....	314
Ni Made Andry Anita Dewi, Ni Putu Luhur Wedayanti	
<i>DAKSINA</i> : SALAH SATU <i>UPAKARA</i> PENTING PADA MASA BALI KUNO YANG DIPERJUALBELIKAN PADA MASA SEKARANG (STUDI KASUS DI DESA BUDUK).....	325
Ni Made Rustini, Ni Ketut Puji Astiti Laksmi	
KECANTIKAN PEREMPUAN BALI: SUATU SIMBOLISASI.....	336
Ni Made Wiasti	
<i>OMOTENASHI</i> , SPIRIT KERAMAHAN MASYARAKAT JEPANG MENYAMBUT <i>TOKYO OLYMPIC 2020</i>	351
Ni Putu Luhur Wedayanti	
NEGASI DALAM KUMPULAN CERPEN <i>1 PEREMPUAN 14 LAKI-LAKI</i> KARYA DJENAR MAESA AYU.....	357
Ni Putu N Widarsini	
CAMPUR KODE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA OLEH PENGGUNA LAYANAN INTERNET INDOSAT OOREDOO.....	365
Ni Wayan Arnati	
TEKS LAGU POP BALI BILINGUAL: ANALISIS LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL.....	373
Putu Utama, Tjokorda Istri Agung Mulyawati, I Nyoman Darsana	

"NA LI YOU TAI YANG, NA LI JIU YOU ZHONG GUO REN": ORANG CINA DI BUMI MOA-CIAPPAH-I	388
Rochtri Agung Bawono	
LAGU, KAUM MUDA DAN BUDAYA DEMOKRASI.....	399
Roma Ayuni A Loebis	
ALIH BAHASA FIGURATIF PADA TERJEMAHAN KARYA SASTRA PUISI	406
Sang Ayu Intan Maharani, I Nyoman Tri Ediwan	
TAHAP PERANCANGAN METODE PEMBELAJARAN <i>BLENDED LEARNING</i> PADA MATA KULIAH SHOKYUU HYOUKI DI PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG UNIVERSITAS UDAYANA	414
Silvia Damayanti, Ni Luh Putu Ari Sulatri	
ALIH WAHANA NOVEL <i>PADA SEBUAH KAPAL</i> KARYA NH DINI KE DALAM PUISI "PADA SEBUAH KAPAL" KARYA MARIA MATILIDIS BANDA	421
Sri Jumadiah	
PENGADANG-NGADANG PADA RUMAH TUSUK SATE SUATU KAJIAN BENTUK DAN FUNGSI.....	427
Tjok Istri Agung Mulyawati R.	
DIMENSI POLITIS DALAM SASTRA LISAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI BANJARAN SUNGAI TANAH DELI	435
Wan Syaifuddin	

MEMAKNAI DEMOKRASI SPIRITUAL DALAM TAHUN POLITIK 2018¹

I Ketut Ardhana²

Program Studi Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Udayana

Abstrak

Setiap kebudayaan dari masyarakat memiliki caranya sendiri dalam mengatur tatanan kehidupannya. Ini artinya setiap masyarakat sudah memiliki kemampuannya berdasarkan kearifan lokalnya dalam mengelola persoalan yang berkaitan dengan masalah harmoni maupun konflik yang ada di sekitarnya. Dalam kaitan ini masyarakat yang sudah memiliki nilai-nilai kehidupannya dapat dikatakan sebagai sebuah suku bangsa atau bangsa (*nation*). Akan tetapi, ketika pengaruh Barat mulai menyentuh dunia Timur, dengan berbagai pahamnya tampaknya dunia Timur mengadopsi pengaruh Barat itu yang bersamaan dengan timbulnya negara (*state*) yang kemudian mengambil alih peran suku bangsa yang dilakukan oleh negara modern itu. Namun demikian, bukan berarti permasalahannya selesai, karena ketika negara modern itu menjadi pilihan, maka tidak semua komunitas masyarakat dapat mencapai apa yang diinginkan dalam konteks kehidupan masyarakat yang demokratis. Pertanyaan utama yang diajukan dalam makalah ini adalah pertama, bagaimana mereka memandang kehidupan yang demokratis ini? Pilihan-pilihan interpretasi apa yang dikedepankan, ketika berhadapan dengan masalah riak-riak sosial, konflik, dan masalah disintegrasi bangsa? Ketiga pelajaran apa yang dapat dipetik dalam upaya memahami dinamika masyarakat di era modern dan postmodern ini? Inilah beberapa pertanyaan yang dibahas dalam makalah ini, dalam upaya untuk memahami secara lebih baik tentang kehidupan multikulturalisme dalam sastra dan budaya demokrasi masyarakat.

Kata kunci: multikulturalisme, bangunan negara-bangsa, sastra, budaya, dan demokrasi

I. Pendahuluan

Kata sastra pada umumnya sering dikaitkan dengan sebuah teks atau tulisan. Namun, di era postmodern sekarang ini, kata sastra tidak selalu pada teks atau tulisan itu, dimana di masa lalu banyak teks tersebut terdapat pada prasasti (*inscription*), dimana dapat ditemui di semua lembaga penyimpanan kekayaan peninggalan masa lalu seperti pada kesempatan untuk meninjau pada peninggalan situs-situs masa lalu. Jadi nilai-nilai yang ada sangat *inherent* dengan kekayaan pusaka budaya itu. Akan tetapi, karena perkembangan zaman, tampaknya tidak

banyak masyarakat memiliki lagi nilai-nilai yang dianggap sebagai kekayaan *local genius*-nya. Karena adanya perkembangan zaman modern yang sudah dimulai tahun 1500 yang bersamaan dengan perkembangan westernisasi, modernisasi, Islamisasi, dan Kristenisasi dan sebagainya yang telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang sudah memiliki nilai-nilai atau tatanan kehidupan yang terbentuk pada masa sebelumnya.

Akan tetapi, tampaknya karena dinamika kehidupan baru masyarakat yang dipengaruhi oleh modernisasi, dan bahkan westernisasi, tampak seolah-olah nilai-nilai apa yang ada sebelumnya itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sudah kuna (*out of date*), yang seringkali tidak dianggap sesuai dengan perkembangan zaman (*tijdgeest* atau *tijdgeist*). Tidak dapat dipungkiri, bahwa masalah-masalah perdebatan ini sangat berkaitan dengan persoalan politisasi agama misalnya, sehingga masyarakat dihadapi pada kebingungan-kebingunan untuk memilih, sementara pada saat itu, tidak banyak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi akibat keteringgalan dalam masalah pendidikan, tentang apa yang di dunia Barat dikatakan sebagai nilai-nilai demokrasi.

Dalam kaitan ini, tampak apa yang dikatakan sebagai nilai-nilai adiluhung ketimuran (*Asian values*), dibenturkan dengan nilai-nilai Barat (*Western values*) yang belum tentu lebih baik dari apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal, karena mereka sendiri sudah memiliki pola panutan yang sudah dimilikinya secara turun temurun (Eriksen, 2002: 9). Nilai-nilai ketimuran yang sering dianggap sebagai *local genius* sebenarnya merupakan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas Indonesia. Akan tetapi, dengan datangnya nilai-nilai baru atau dari luar tampaknya perlu diantisipasi dengan baik karena di satu

¹Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Sastra dan Budaya III tentang "Mengkaji Sastra dan Budaya Membangun Demokrasi yang Sehat", yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018.

²Guru Besar Sejarah Asia pada Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya-Universitas Udayana Denpasar.

pihak, ada yang menguntungkan, dan di pihak yang lainnya ada yang merugikan. Ini dapat dilihat bagaimana dengan masuknya semua agama yang "diimpor" masuk

ke Indonesia dalam konteks dinamika sejarah Indonesia di masa lalu dan masa kini. Perkembangan ini dibawa sekelompok masyarakat tertentu atau etnis tertentu yang kemudian memasuki relasi yang kompetitif dalam dinamika politik dan pasaran kerja (Ardhana, 2010: 160—163, lihat juga: Eriksen, 2002: 9). Dengan kata lain, tidak ada satu pun agama yang dianut dan dipeluk oleh masyarakat di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia pada umumnya berasal dari daerah asli Indonesia pada khususnya, dan di Asia Tenggara pada umumnya. Ini misalnya dapat dilihat mulai dari agama Hindu, Islam, Katholik dan Protestan, tampak diserap dan disesuaikan dengan kondisi tanah air dan budaya Indonesia. Tidaklah mengherankan jika, Presiden Indonesia yang pertama Indonesia Soekarno pada saat itu mengatakan, bahwa kalau menjadi Hindu di Indonesia jangan menjadi orang India, kalau menjadi Muslim di Indonesia, janganlah menjadi orang Arab, atau menjadi Kristen di Indonesia tidak menjadi orang Barat di Indonesia. Ungkapan yang dikatakan oleh Soekarno itu, tampaknya memberi semangat akan arti pentingnya menjadi orang Indonesia.

Dalam teori terbentuknya bangsa dikatakan, bahwa sebuah bangsa atau negara bangsa muncul ketika kesadaran tertinggi individunya diserahkan kepada paham kebangsaan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah memang ada jaminan, bahwa ketika negara-bangsa terbentuk, nilai-nilai individu mereka dapat dijamin kebertahanannya atau tidak? Di sinilah muncul masalah akan kekhawatiran akan peran negara-bangsa (*nation-state building*), karena berdasarkan pengalaman ketika berkecamuknya Perang Dunia II, tampak konsep negara-bangsa tidak menjamin hak-hak individu seseorang yang telah dikebiri oleh kekuasaan otoriter negara sebagaimana yang telah terjadi di Perancis pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte, di Italia dengan Muzzolininya, dan di Jerman dengan Hitlernya. Kebijakan pemimpin besar dari negara-bangsa itu menjurus kepada keditaktoran absolut, yang membawa masyarakatnya ke jurang penderitaan yang telah berbekas dalam konteks perkembangan demokrasi di negara-negara Barat yang lebih menekankan aspek *chauvinismenya*.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, sangatlah perlu mengontrol dan mengantisipasi jalannya sebuah pemerintahan agar sesuai dengan rel atau bangunan negara demokratis, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pemimpin masa lalu

yang “*abuse of power*”, yang tidak hanya menyengsarakan kelompok pemimpinnya, tetapi juga pada akhirnya kehidupan masyarakat di akar rumput (*grass roots*). Bagaimana misalnya dalam historiografi nasional Indonesia yang masih berkiblat pada Javwanisme yaitu banyaknya generasi muda yang belajar ke Jawa, dan banyak pula guru-guru Jawa yang mengajar di luar Jawa, sehingga sejarah misalnya semakin sulit terlepas dari perspektif Jawanisme misalnya (Kurniawan, 2017: 209—210).

Dengan demikian, pertanyaannya adalah adakah masih nilai-nilai demokrasi yang sudah berakar di masa lalu pada masyarakat asli kita atau memang sudah lapuk atau usang dimakan zaman, sehingga masyarakat kita kehilangan fondasi peradaban dan kebudayaannya. Berbicara tentang keaslian nilai-nilai (*genuine*), seringkali pula kurang laku di mata orang awam, dengan pengertian, apakah ketika kita berbicara tentang nilai-nilai keaslian ini, hanya berkaitan dengan aspek sosial budaya, atau tidak bersinggungan dengan masalah nilai-nilai yang fundamental dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu tampaknya tidak, karena di samping masalah sosial budaya, tampak aspek kehidupan demokrasi yang lebih dikenal dengan “*spiritual democracy*” yang diharapkan akan mampu merekat komunitas atau masyarakat yang telah menjadi terbelah-belah sebagai akibat dampak westernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, Stiglitz (2007: 171) berpendapat: “*with full global economic integration, the world will become like a single country, and the wages of unskilled workers will be the same everywhere in the world, no matter where they live*. Namun demikian yang perlu dicermati sebagai dampak adalah jika tidak diantisipasi secara cerdas, maka di satu pihak dapat mengintegrasikan kepentingan global, namun di pihak yang lainnya, ternyata menyebabkan terkikisnya fondasi kebudayaan dan peradaban masyarakat di Nusantara ini. Di sinilah signifikannya makna pendidikan bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dalam memelihara dan mempertahankan bangunan negara-bangsa yang sudah terbentuk itu (Sulistiyani, 2011, 77-103).

II. Kosmologi, Lokal Genius, dan Nilai-nilai Demokrasi

Aspek sosial budaya dan politik masyarakat di Nusantara pada khususnya dan bahkan di belahan dunia yang lain yang disebut memiliki masing-masing

"ancient culture"-nya sejak masa prasejarah (*prehistoric time*), tampaknya memiliki aspek kesamaan dalam pengertian bagaimana mereka menginterpretasikan tentang adanya nilai-nilai demokrasi yang paling awal yang sudah berakar di masyarakatnya. Simbul tentang matahari yang dianggap sebagai Dewa Surya atau setelah masuknya agama Hindu disebut dengan Sanghyang Surya dianggap memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan rasa keadilan kepada umat manusia. Makna yang terkandung di dalamnya adalah rasa kesamaan atau keadilan, dimana Sang Surya menyinari semua yang ada di bumi tanpa pengecualian, baik terhadap yang kaya dan miskin, dan sebagainya.

Bahkan, ketika menyebarnya kebudayaan Hindu dari daratan India di Asia Selatan, seperti di Jepang yang dikenal sebagai "Negeri Matahari Terbit", dikaitkanlah bagaimana nama etnis Sinto yang dikaitkan dengan adanya pengaruh dari aspek budaya India yaitu dengan kata "Sinta". Nama Sinta pada kata Dewi Sinta yang berpasangan pada tokoh Rama sebagaimana diketahui adalah nama tokoh penting dalam cerita epik India yang dikarang oleh Valmiki yaitu, *Ramayana* yang menjadi cerita epos penting selain karya Bagawan Wyasa, *Mahabharata*. Menurut catatan kesejarahan disebutkan, bahwa *Ramayana* lebih tua dibandingkan dengan *Mahabharata* (1400 SM sampai 1000 SM) yang kedua epos tersebut mengandung uraian tentang adat istiadat kebiasaan masyarakat dan pemerintahan, peradaban dan kebudayaan manusia di masa lalu (Pendit, 1965: xi). Nilai-nilai keunggulan tersebut tampak banyak berpengaruh pada tatanan politik dan kemasyarakatan di Indonesia.

Konsep kosmologi dan kosmogoni tampaknya sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh budaya Hindu atau India ini, dimana berdasarkan konsep ruang tidak hanya ruang dikelompokkan menjadi tempat para dewa, tetapi juga ruang juga diberikan kepada mahluk-mahluk yang berada di dunia bawah. Dalam kaitan ini adanya konsep gunung-laut (*sacred and unsacred places*), dimana gunung tempat bersemayamnya para dewa dan di laut tempat mahluk yang dianggap sebagai oposisi dari peranan yang dimainkan oleh para dewa. Di sini dapat dilihat adanya pemberian rasa kesamaan dan keadilan dalam kaitannya dengan kosmologi ini. Dalam masa-masa selanjutnya konsep ini yang kemudian dikenal dengan *rwabhineda* seperti utara-selatan, baik-buruk, skala

dan niskala, dan sebagainya. Di sini tampak adanya perkembangan kepercayaan masa tradisi prasejarah dengan adanya pengaruh agama Hindu sebagaimana yang terjadi pada masa selanjutnya.

Dalam kaitan ini penting melihat selain aspek kosmologi dan kosmogoni yang ada dengan melihat pada aspek mitos yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa mitos itu bersifat nyata dan tidak nyata atau skala dan niskala (*real dan unreal*). Artinya ada mitos yang tidak dipercayai makanya disebut sebgaitahayul, sementara ada mitos yang bersifat nyata (*real*), dimana masyarakat meyakini akan kebenarannya. Untuk itu nilai-nilai demokrasi yang dikaitkan dengan lokal genius atau kearifan lokal dapat dilihat pada cerita tentang Men Brayut, yang memiliki 18 anak, dimana Men Brayut dapat berlaku adil terhadap anak-anaknya. Di sini ditekankan nilai-nilai keadilan yang hendaknya dapat dicermati oleh masyarakat dimana patung tentang Men Brayut itu dipuja terutama di kawasan Kabupaten Gianyar. Ini artinya masyarakat Bali, jauh sebelum masuknya nilai-nilai Barat tentang demokrasi, konsep tentang nilai-nilai keadilan sudah ada di Bali yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai lokal dengan ajaran agama Budha yang berkaitan dengan kepercayaan pada pemujaan kepada Dewi Hariti. Di sini tampak adanya perpaduan antara kepercayaan lokal antara kepercayaan masa tradisi prasejarah dengan adanya pengaruh agama Budha.

Di sini dapat dilihat, bahwa tradisi kepercayaan kepada Sang Surya yang hampir terdapat di sebagian besar belahan dunia menjadi sebuah kekayaan atau kearifan lokal (*local genius*) yang tampaknya berkembang dari dahulu hingga sekarang. Demikianlah dari contoh-contoh di atas dapat dilihat adanya nilai-nilai demokrasi itu yang tersurat dalam berbagai peninggalan pusaka budaya masyarakat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada *lontar-lontar* yang berkaitan dengan filsafat kehidupan yang memberikan penjelasan tentang makna matahari atau dewa surya, cerita Men Brayut sebagaimana masih dapat dilihat pada patung-patung Men Brayut di kawasan cagar budaya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana peran negara dapat berkontribusi terhadap nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya sudah ada di komunitas lokal tersebut?

Bagaimana pula dapat memanfaatkan situs-situs yang sarat dengan kesucian sebuah agama tertentu – yang secara dikategorikan sebagai sebuah situs cara

budaya atau (*cultural heritage sites*) -- untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Di sinilah tantangan yang dihadapi oleh umat agama tertentu seperti penganut agama Hindu yang berada di luar Bali seperti di Jawa misalnya, untuk megharapkan kepada pemerintah daerah dan pengusaha agar memikirkan keefektifan terhadap penanganan masalah-masalah keagamaan untuk tidak menimbulkan "*social and political tension*" di kalangan masyarakat.

III. Kearifan Lokal dalam Konteks Bangunan Negara-Bangsa

Sebagaimana sudah dijelaskan di depan, bahwa sejak kedatangan pengaruh luar ke wilayah Nusantara seperti perkembangan agama-agama, pengaruh Barat melalui kolonialisme dan imperialisme tampaknya telah membawa pengaruh pada perkembangan komunitas lokal di Indonesia. Terjadinya pergeseran atau cara pandang tentang kehidupan (*way of life*) dari masyarakat, karena dinamika sosial budaya, politik dan ekonomi yang terjadi. Masyarakat lokal diberikan alternatif atau pilihan-pilihan yang di satu pihak, tampaknya mengintegrasikan dengan tradisi dan budaya lokal, namun di pihak yang lainnya, komunitas lokal mulai dipengaruhi yang secara sadar atau tidak telah berpengaruh terhadap prilaku dan nilai-nilai kearifan yang sebenarnya sudah dimilikinya sejak lama. Dalam hal ini termasuk tatanan atau nilai demokrasi yang dimiliki sejak dahulu tampaknya mulai dilupakan.

Terdapat ruang bagi pengaruh Barat untuk mengisi dan mempengaruhi dinamika yang ada di masyarakat lokal. Dalam ruang yang terbuka inilah terjadinya proses pengikisan nilai-nilai budaya atau demokrasi yang pernah ada di masyarakat, sehingga secara sadar atau tidak masyarakat mulai melupakan secara perlahan-lahan kearifan yang dimilikinya itu, dan mulai menerima pengaruh-pengaruh budaya dan nilai-nilai demokrasi dari luar.

Diskursus yang berkembang bahwa sejak era kolonial secara intrinsik masyarakat tradisional Indonesia adalah masyarakat yang damai. Bahkan, gambaran Belanda mengenai orang Jawa sebagai "manusia yang paling lembut di muka bumi" (*het zachste volk ter aarde*) yang dianggap ada pada akbad ke-18, padahal penuh bersimbah darah akibat peperangan, dan juga masyarakat Bali sebagaimana dituangkan dalam lukisan-lukisan yang berkaitan dengan masalah

kepariwisataan yang mengesankan bahwa kekerasan dan konflik dapat terjadi di Indonesia hanya sebagai akibat intervensi dari luar (Cribb, 2005: 47).

Inilah yang digambarkan oleh Henk Schulte Nordholt terhadap perkembangan Bali yang dianggapnya sebagai sebuah “benteng yang terbuka”. Di sini tampak, masyarakat lokal sulit mengendalikan pengaruh-pengaruh luar yang dianggapnya sebagai pengaruh global yang membawa polusi kebudayaan (Picard, 1999: 15, cf. Sulanjari dan Ardhana, 2017a), sementara di pihak yang lainnya, yaitu peran negara tampak belum secara maksimal memainkan perannya. Sejak dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945, memang masyarakat secara teoretis menurut konsep nasionalisme negara-bangsa sudah menyerahkan sebagian besar kesadaran tertingginya kepada negara. Negara seolah-olah memiliki kekuasaan autonomi tentang masalah demokrasi sejak dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia itu, dan tampaknya masyarakat tidak sepenuhnya menyadari akan hak-hak yang pernah dimilikinya itu. Padahal menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat beberapa pasal di antaranya pasal 27 yang menyangkut masalah hak-hak kewarganegaraan itu.

Akan tetapi, hal berkaitan dengan kewarganegaraan ini tampaknya tidak berjalan mulus, karena sejak kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun (1968—1998) yang dimulai dengan era reformasi tampaknya kekuasaan otonomi yang ada itu melekat di pemerintah pusat, sementara masyarakat di pinggiran seperti di wilayah perbatasan (*remote and underdeveloped region*) yang jauh dari pusat perkotaan, merasa terabaikan oleh kebijakan pemerintah pusat. Ketika begitu kuatnya pemerintah pusat yang berorientasi pada stabilitas, pembangunan, dan modernisasi (Wiener, 1999: 62), pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan masyarakat di daerah yang terpinggirkan, terisolasi dan termiskinkan itu? Di sinilah pentingnya memahami tentang bagaimana sastra itu tidak dimaksudkan hanya berkaitan dengan masalah-masalah budaya tulis (*written sources*), tetapi juga berkaitan dengan masalah budaya lisan atau tradisi lisan (*oral tradition* atau *unwritten sources*) yang masih hidup dan melekat di kalangan masyarakat pendukungnya. Contoh menarik yang perlu diungkapkan di sini adalah dengan melihat tentang apa yang terjadi di masyarakat perbatasan, dimana lokasinya yang jauh letaknya dari perkotaan dan hingar-bingarnya kehidupan masyarakat

perkotaan yaitu pada kehidupan masyarakat lokal di kawasan Long Pasia di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Ketika ada riak-riak atau konflik di wilayah perbatasan Indonesia di Pulau Sipadan, Pulau Ligitan dan Blok Ambalat tampak hubungan Indonesia dan Malaysia yang terjadi di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, menjadi tidak harmonis. Ini terjadi karena berbeda halnya dengan wilayah yang dijajah oleh pemerintah Inggris untuk pulau-pulau yang menjadi daerah koloninya dibangun sebuah mercusuar.

Sementara bagi Belanda untuk daerah koloninya tidak dibangun mercusuar sehingga ketika ada gejolak perbatasan seperti ini, Indonesia memiliki kelemahan karena tidak adanya bukti bangunan mercusuar tersebut. Akan tetapi, apa akibatnya kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang sudah ribuan tahun sejak masa prasejarah, sejarah klasik, hingga sejarah modern menjadi tercerai-berai akibat persoalan-persoalan antar negara yang mau tidak mau menyentuh kehidupan masyarakat lokal di wilayah perbatasan?

Dari gambaran tersebut di atas dapat dicermati, bahwa meskipun terjadi persoalan di tingkat negara antara dua negara Malaysia dan Indonesia, akan tetapi kehidupan masyarakat di akar rumput tampaknya harmonis. Di Long Pasia yang berada di wilayah perbatasan sangat percaya akan adanya kekuatan spiritual yang berada pada sebuah batu peninggalan situs purbakala yang berada di wilayah pegunungan. Batu besar yang ada di wilayah perbatasan itu, diyakini memiliki kekuatan sehingga banyak penduduk datang mengadakan acara ritual yang dikunjungi tidak hanya oleh komunitas yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, tetapi juga dari mereka yang berasal dari perbatasan Indonesia. Batu ini bukan merupakan "teks", akan tetapi di kalangan Ilmu Kajian Budaya (*Cultural Studies*), batu ini yang dianggap sebagai teks yang memiliki atau menyimpan pesan yang dapat disejajarkan dengan sebuah teks. Batu itu merepresentasikan sebuah pesan yang memiliki makna adiluhung bagi masyarakat sekitarnya, dimana mampu mengintegrasikan rasa persatuan di antara komunitas yang ada. Dengan adanya indikator budaya yang merupakan asset perekat (*social cohesion*) di antara mereka, sangat memungkinkan mereka hidup merasa aman, jauh dari pertikaian antara dua negara yang berkaitan dengan masalah perbatasan, di antaranya illegal logging,

penguatan persoalan hukum, hubungan bilateral, persoalan-persoalan sosial politik (Pongtuhuran, 2013: 544).

Bagaimana misalnya mereka dalam sebuah acara adat saling kunjung mengunjungi, menjadi pemersatu dalam setiap kegiatan merupakan sebuah kekuatan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mempertahankan dan melakukan aktifitas kehidupannya secara berkelanjutan. Pertanyaannya mengapa demikian? Ini terjadi karena tampaknya masyarakat di perbatasan sudah memiliki relasi sosial yang kuat yang berbasis pada landasan kehidupan yang sudah terbentuk pada masa prasejarah, sejarah klasik, hingga sejarah modern yang berdasarkan kearifan lokal yang sudah mengakar sejak masa nenek moyangnya.

Dengan adanya relasi sosial dan masyarakat menganggap, bahwa dengan sebuah batu besar yang ada di sekitar mereka antara dua wilayah yang memiliki batas negara yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia (Ardhana, 2017). Dengan pemahaman ini maka dapat dikatakan, bahwa batu yang bukan merupakan teks, namun dapat dianggap sebagai teks yang mampu menyatukan di antara kedua etnis yang berbeda maka ini merupakan suatu yang perlu dipertahankan dalam konteks pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Dari pengalaman ini dapat dikatakan, bahwa masyarakat atau komunitas setempat tidaklah terlalu masalah dengan berbagai riak-riak politik yang terjadi di tataran kehidupan bernegara (*state building*). Akan tetapi, apa yang dilakukan kelompok komunitas dengan adanya pembuatan representasi hal-hal yang dapat menyatukan mereka dalam konteks bangunan suku bangsa (*nation building*), meskipun mereka berbeda warga kenegaraan, tampaknya memiliki makna yang penting yang melampaui batas-batas wilayah negara (*border linkage*).

Dengan demikian, betapa perlunya penguatan budaya dan identitas lokal yang dimiliki oleh penduduk yang menghuni wilayah perbatasan Indonesia yang berada di sepanjang perbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara, terutama dalam kaitannya dengan bangunan negara-bangsa (*nation-state building*). Ini dimaksudkan dengan melihat sitem nilai yang dijadikan pedoman, pola-pola hubungan antar etnis, bentuk ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga apabila terjadi beberapa riak kecil di perbatasan akan dapat diantisipasi dengan baik, dan dapat diberikan alternatif penyelesaian permasalahannya.

IV. Kearifan Lokal, Demokrasi Spiritual di Kawasan Regional ASEAN

Pemikiran ke arah menemukan nilai-nilai demokrasi spiritual tampaknya sangat signifikan dalam keberlanjutan komunitas di Indonesia, mengingat akhir-akhir ini karena berkembangnya arus modernisasi dan globalisasi tampaknya berpengaruh kuat dalam konteks penguatan jati diri suku bangsa di Indonesia. Banyak daerah yang mulai sadar untuk menemukan kembali jati diri mereka setelah cukup lama kehilangan arah dalam keberlanjutan kehidupan mereka. Ini menjadi masalah karena hampir sebagian masyarakat Indonesia pada khususnya, dan masyarakat Asia Tenggara pada umumnya yang memiliki budaya multikultur. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mengarah pada pembangunan masyarakat yang monokultur, akan tetapi kenyataan sejarah berbicara lain.

Inilah sebabnya pula mengapa dalam konteks hubungan negara dengan negara mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan monokulturalisme dan berusaha mengembangkan kehidupan yang multikultur. Namun demikian, pemahaman tentang multikultur ini hendaknya jangan di masyarakat bawah saja, tetapi penguasa dalam hal ini pemerintahan hendaknya memahami makna dari kehidupan yang multikultur itu. Dalam hal ini, hendaknya dipahami dan diberi ruang gerak bagi keberagaman atau kebhinekaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ruang ini tidak tersedia, bagaimana pun baiknya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dibuat, maka gangguan-gangguan stabilitas dalam bentuk resistensi akan muncul.

Tidak hanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat regional, keinginan atau desakan membuat kerjasama regional dalam kaitannya dengan keberagaman, hak azasi manusia telah dikedepankan. Seperti organisasi di tingkat regional ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) misalnya yang dibentuk pada tahun 1967, tampaknya ketika didirikan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan politik yang belum memberikan jawaban yang optimal terkait berbagai dinamika yang terjadi di tingkat kawasan regional. Sementara itu, berbagai permasalahan berkaitan dengan kasus-kasus intoleransi banyak terjadi sebagaimana yang terjadi dengan masalah pengungsi

Rohingya akhir-akhir ini. Bagaimanapun juga ASEAN harus memainkan perannya dalam mencari solusi sebagaimana yang terjadi itu.

Di sinilah pentingnya pemahaman akan upaya menyatukan persepsi tentang bagaimana kita memaknai keberagaman masyarakat di kawasan ASEAN. Seringkali terjadi pertemuan antar negara tingkat pemerintahan, namun pembahasan yang dilakukan oleh kelompok ahli, ilmuwan, akademisi seringkali jarang dilakukan dibandingkan dengan apa yang dibahas di tingkat pemerintahan antar negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, perlu melibatkan secara optimal, tidak hanya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah atau *government to government* (G to G) saja, apabila pertemuan di tingkat ASEAN itu dilaksanakan, akan tetapi, peran komunitas dengan komunitas (*community to community*) yang lain dalam kaitannya dengan masalah keberagaman di kawasan ASEAN perlu dimantapkan. Sebagaimana dinyatakan pada awal berdirinya ASEAN (Dewi Fortuna Anwar, 1994: 45):

“Indonesia has also had to refurbish its image abroad and convince the West that the new government was really worth supporting. Participation in regional co-operation was, therefore, also intended by the New Order leaders to convince the Western countries that their assistance to Indonesia would not be wasted. Indonesia’s involvement in a regional association was intended to show that the country would no longer be a source of conflict in the region and a threat to neighbouring countries. Regional co-operation could be seen as a further proof that the Indonesian Government would devote its energies and resources to internal development rather than to the pursuit of an adventurous foreign policy.”

Hingga saat ini, hubungan komunitas dengan komunitas apakah itu komunitas di bidang keilmuan tertentu dilakukan oleh komunitas itu sendiri yang bersifat lintas negara atau wilayah. Misalkan dalam kaitannya dengan masalah pembahasan kebudayaan kuno (*ancient culture*), hak azasi manusia, gender, kearifan lokal dan sebagainya. Ini penting untuk dicermati, bahwa sebelum masuknya agama-agama besar ke sebuah wilayah di dunia, penduduk lokal sudah memiliki pola pengelolaan sumber alam mereka seperti bagaimana mereka menghargai sinar matahari, air, api, sebagai sesuatu yang melekat dengan kehidupan keseharian mereka (cf. Hezri, 2016: 65—71, Ardhana, 2016). Berbagai kegiatan yang menghormati kekayaan alam semesta ini perlu dilakukan, sehingga mereka memahami bagaimana sebenarnya memiliki kesamaan-kesamaan dalam

menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan (cf. Ardhana et al., 2017b; Falyey, 2015: 121—137). Pembahasan-pembahasan masalah ini sering ditangani oleh komunitas di bidang tersebut. Akan tetapi, apa yang dilakukan itu sering tidak korelatif dengan apa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah antar negara di tingkat ASEAN.

Contoh yang lain misalnya pembahasan masalah demokrasi spiritual (*spiritual democracy*) yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan demokrasi politik juga tidak banyak dilakukan. Padahal pembahasan demokrasi spiritual jauh lebih penting, ketimbang membahas demokrasi politik. Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi spiritual itu? Demokrasi spiritual adalah dirumuskan sebagai berikut:

“Grounded in the reality that we all inhabit a living conscious Universe, we can all take the journey to find inner knowledge, attain the goal of that knowledge, come back and transform ourselves, and then take action for the benefit of our own lives, the life of our species, and the life of the Earth.”
<https://www.planetaryphilosophy.com/wp-content/uploads/2017/05/SPIRITUAL-DEMOCRACY.pdf>. Diakses 11 Februari 2018, pkl 16.42.

Demokrasi spiritual didasari pada pemahaman, bahwa kita hidup di bumi yang sama memiliki kesadaran akan pentingnya hidup bersahabat dengan alam dan semua makhluk yang ada di sekitarnya. Untuk itu, sesuai dengan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri adalah hendaknya kita mampu mentransformasikan diri kita dan mengambil tindakan untuk kepentingan kehidupan semua makhluk dan keberlanjutan kehidupan di planet bumi ini.

Dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagaimana terjadi di tahun 2018 yang dianggap sebagai “Tahun Politik”, tampaknya kaitan antara demokrasi politik tidak terlepas dari demokrasi spiritual. Untuk itu, betapa pentingnya para figur politik yang bertarung di tahun politik ini tidak hanya mengedepankan demokrai politiknya semata, tetapi lebih memberikan apresiasi pada bagaimana demokrasi spiritual hendaknya diaplikasikan.

Kearifan-kearifan lokal masyarakat yang bersifat universal perlu dikedepankan, sehingga di tahun politik ini riak-rial social politik, dengan berbagai dinamikanya hendaknya dapat diantisipasi dengan baik. Terlebih-lebih dalam kehidupan masyarakat yang sangat kental dengan ideologi primordialismenya tampaknya pemahaman dan pembahasan masalah demokrasi spiritual agar

dilakukan lebih komprehensif dan komparatif. Ini tentu perlu disesuaikan dengan etika politik yang berkembang di masyarakat kita (Suseno, 2003; 12).

V. Simpulan

Dengan pembahasan ini diharapkan, bahwa pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi di tahun politik ini, hendaknya menekankan pula bagaimana demokrasi spiritual hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik. Ini sangat penting dalam konteks mengingatkan masyarakat atau komunitas tertentu tentang arti pentingnya keberagaman, adanya konektivitas atau relasi sosial yang sudah terjalin di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.

Berbagai potensi budaya lokal merupakan modal sosial dan modal budaya yang sama pentingnya dengan modal politik, dimana masyarakat harus mampu secara cerdas dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Dengan bekal kualitas pemahaman yang dimilikinya, diharapkan bahwa kita hendaknya mampu mengurangi riak-riak di akar rumput masyarakat dalam konteks pelaksanaan PILKADA yang sehat, bersih, dan transparan menuju pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhana, I Ketut. 2018. "The Feminism Deities in the Balinese Society: Local Genius, Indian Influences, and Its Worship. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional tentang *Exploring Devinity through the Feminine in Ancient Cultures*, Mumbai-India, January 31th to February 4.

Ardhana, I Ketut. 2017a. "Border Area between Nunukan Regency and Tawau-Sabah", Makalah dipresentasikan pada Konvensi Internasional ke-10, The Tenth International Convention of Asia Scholars, July 20-23, Chiang Mai University, Thailand.

Ardhana, I Ketut. Sulanjari, I Ketut Setiawan, A.A. Rai Wahyuni. 2017b. *Pura Besakih, Candi Sukuh, dan Candi Cetho: Persamaan, Perbedaan Arsitektur, dan Indigenisasi Budaya di Bali dan Jawa Tengah*. Denpasar: Universitas Udayana.

Ardhana, I Ketut. 2016. "Religious Teachings on Sustainability in the Context of Hinduism in Bali", paper presented at the Asian Conference, A Call to Dialogue on the Sustainability of Life in the Asian Context, held by the JCAP (Jesuit Conference of Asia Pasific) at the University Sanata Dharma Yogyakarta, from August 8 to 10.

Ardhana, I Ketut dan Yekti Maunati (et al.). 2010. *Kontestasi Identitas dan Diaspora Bugis di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur-Sabah*. Jakarta: LIPI Press.

Cribb, Robert. 2005. "Pluralisme Hukum, Desentralisasi, dan Akar Kekerasan di Indonesia", dalam Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith dan Roger tol (eds.), *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: LIPI, LASEMA CNRS, KITLV.

Dewi Fortuna Anwar, 1994. *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism*. New York dan Singapore: St. Martin's Press and Institute of Southeast Asian Studies.

Falyey, Lindsay. 2015. *Understanding Southeast Asia: Syncretism in Commonalities*. Thailand: Thaksin University Press.

Pongtuluran, Yonathan. 2013. "Developing Economy in the Border of East Kalimantan", dalam *Academic Research International*, Volume: 4, Number: 4, July 2013.

Eriksen, Thomas Hylland. 2002. *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press.

Hezri, Adnan A. 2016. *The Sustainability Shift: Refashioning Malaysia's Future*. Kuala Lumpur-Malaysia: Institute of Strategic and International Studies.

<https://www.planetaryphilosophy.com/wp-content/uploads/2017/05/SPIRITUAL-DEMOCRACY.pdf>. Diakses 11 Februari 2018, pkl 16.42.